BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan saling membutuhkan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Aristoteles bahwa manusia adalah *zoopolitik*, secara harafiah hewan sosial, dimana Aristoteles menjelaskan bahwa manusia dinaturalisasikan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, hal ini membedakan manusia dengan hewan. Masyarakat yaitu sekelompok orang dalam arti luas yang hidup bersama sebagai satu kesatuan yang besar, saling membutuhkan, mempunyai kesamaan karakteristik, dan dihubungkan oleh pola budaya yang serupa (Telly, et.al,2010: 491).

Hal ini akan menjadi permasalahan ketika dua orang atau lebih dalam masyarakat mempunyai kebutuhan dan objek kebutuhan yang sama, serta tidak adanya sifat mengalah di antara orang-orang tersebut. Oleh karena itu, bisa saja timbul konflik di antara mereka, ketika konflik terjadi maka tidak mungkin tercipta keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya peraturan yang dapat dilaksanakan serta disepakati oleh seluruh masyarakat agar menciptakan ketertiban dan perdamaian bersama-sama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dibuatlah sebuah aturan-aturan yang diciptakan secara kolektif, kemudian aturan tersebut dinamakan hukum.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa hukum itu dinamis, universal dan bersifat abstrak dimana tidak dapat dilihat dan hanya dapat dimengerti dan dihayati. Sudah tentu tidak semua individu masyarakat memahami hukum itu secara benar atau dengan istilah lain dikatakan buta hukum. Kurangnya pemahaman pada hukum dapat dilihat dari berbagai media massa antara lain, seperti sebuah kasus :

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di suatu desa, seorang wanita mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Namun, karena kurangnya pemahaman hukum dan kurangnya akses ke informasi tentang perlindungan hukum yang tersedia, wanita tersebut tidak tahu bahwa ada undang-undang dan mekanisme hukum yang melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, dia tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya, tidak mencari bantuan atau perlindungan, dan tetap berada dalam situasi yang berbahaya.

Kasus lainnya merupakan kasus yang dialami oleh seorang warga desa menjadi korban penipuan oleh seorang oknum yang menawarkan investasi palsu dengan janji keuntungan yang tinggi. Karena kurangnya pemahaman hukum tentang penipuan dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana melaporkan dan mengejar tindak pidana penipuan, warga desa tersebut tidak dapat melindungi dirinya sendiri secara hukum. Dia kehilangan uangnya dan tidak tahu langkah apa yang harus diambil untuk mengajukan laporan ke pihak berwenang.

Kasus selanjutnya terjadi pada saat pemilihan umum disuatu desa, terdapat pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Namun, karena kurangnya pemahaman

hukum tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan, banyak warga desa yang tidak memahami proses pemilihan, tata cara pencoblosan, atau pentingnya partisipasi dalam pemilihan. Akibatnya, sebagian besar warga desa tidak menggunakan hak pilihnya atau melakukan kesalahan prosedural yang dapat mempengaruhi validitas pemilihan. Kasus-kasus di atas menyoroti pentingnya pemahaman hukum yang memadai di kalangan masyarakat desa. Kurangnya pemahaman hukum dapat menyebabkan warga desa menjadi rentan terhadap penyalahgunaan hak, pelanggaran hukum, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa melalui pendidikan hukum dan akses yang lebih baik ke layanan hukum.

Kasus-kasus di atas menyoroti pentingnya pemahaman hukum yang memadai di kalangan masyarakat desa. Kurangnya pemahaman hukum dapat menyebabkan warga desa menjadi rentan terhadap penyalahgunaan hak, pelanggaran hukum, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa melalui pendidikan hukum dan akses yang lebih baik ke layanan hukum. Padahal Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengakui hak asasi manusia setiap orang atau warga negaranya. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Menurut Ishaq (2008:71) mereka memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang dikenal sebagai prinsip kesamaan sebelum hukum. Prinsip kesamaan sebelum hukum berarti persamaan tidak hanya di mata hukum, tetapi juga akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Dari konsep dan tujuan ini muncul istilah akses terhadap hukum dan keadilan. Manan (2005:98) mengatakan dalam pengertian pemahaman hukum ini tidak ada syarat mengetahui yang harus dipenuhi oleh subjek-subjek yang bersangkutan. Fokus pemahaman hukum adalah persepsi masyarakat dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Untuk memenuhi prinsip dan tujuan akses hukum dan keadilan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (kemudian dikenal sebagai UU Bantuan Hukum). Lembaga bantuan hukum, atau LBH, didirikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum tanpa biaya apalagi dapat kita lihat bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang banyak memiliki keterbatasan pengetahuan tentang hukum itu sendiri “ada sebuah kasus mengenai masalah pertanahan yakni kasus pemalsuan surat keterangan tanah yang dilakukan oleh kepala desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, pada kasus tersebut kepala desa memalsukan sekitar 349 surat tanah dengan luas tanahnya yakni 22 hektare yang ternyata itu adalah tanah milik PTPN II Melati Kebun sehingga masyarakat harus terlibat keributan dengan pihak PTPN II tersebut, Warga mengaku tanah tersebut merupakan pelepasan HGU PTPN II sesuai surat BPN nomor 42/HGU/BPN/2002/tanggal 29 September 2002, serta

surat Gubernur Sumatera Utara, tanggal 29 Oktober tahun 2004 (lampiran tentang tuntutan rakyat 8,74 hektare di kebun Melati dan garapan rakyat di kebun Melati di areal 22,4 hektare), dan akhirnya dalam kasus tersebut di menangkan oleh pihak PTPN II karena sudah jelas lahan tersebut tercatat milik BUMN dan merupakan lahan dalam kawasan guna usaha” dalam tribunnews.com (01, Februari 2023).

Dari kasus yang terjadi di atas ada beberapa alasan yang menunjukkan bahwa masyarakat desa kurang memahami tentang administrasi pertanahan seperti kekurangan keterbukaan informasi, masyarakat desa sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai hak-hak tanah, peraturan pertanahan, atau prosedur legalitas tanah. Keterbatasan informasi ini dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai status kepemilikan tanah, dan memungkinkan terjadinya konflik atau penyalahgunaan tanah.

Ketidakpastian hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang mengenai peraturan pertanahan yang kompleks dan sulit dipahami dapat menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat desa. Ketidakjelasan mengenai hak kepemilikan tanah, prosedur legalitas, atau tata ruang dapat memunculkan penyalahgunaan, korupsi, atau tindakan ilegal lainnya. Ketidakpastian hukum ini dapat memperburuk masalah pertanahan di masyarakat desa.

Kurangnya sumber daya dan akses ke bantuan hukum, masyarakat desa sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan akses ke bantuan hukum yang memadai. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk melindungi hak-hak tanah mereka, menavigasi prosedur legalitas, atau

memperjuangkan keadilan dalam sengketa tanah. Ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah juga dapat mempengaruhi penyelesaian masalah pertanahan di masyarakat desa.

Permasalahan tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum masyarakat desa akibat minimnya informasi tentang hukum yang didapat oleh masyarakat desa serta keterbatasan biaya untuk membayar pengacara yang membuat warga desa menjadi buta hukum. Untuk mengatasi masalah ini membutuhkan upaya yang holistik, termasuk peningkatan akses terhadap informasi, penguatan sistem catatan pertanahan, perbaikan hukum dan regulasi, serta peningkatan akses ke bantuan hukum bagi masyarakat desa. Untuk itu LBH memiliki program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan lembaga bantuan hukum itu sendiri.

Salah satu penyebab kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa ketidaktahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku atau ketidaktahuan mereka tentang hak orang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, Pasal 1 ayat (1 dan 2), Menurut undang-undang, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum tanpa membayar kepadanya atau secara gratis.

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 mengatur tiga pihak yaitu masyarakat penerima bantuan hukum (masyarakat miskin), masyarakat pemberi bantuan hukum (Lembaga Bantuan Hukum/LBH), serta pemberi bantuan hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI). Dukungan hukum disediakan

oleh pemasok. Bantuan hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diberikan secara online gratis bagi masyarakat penerima bantuan hukum. Bantuan hukum disediakan meliputi permasalahan hukum pidana, hukum perdata, dan ketatanegaraan.

Sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, setiap orang yang terlibat dalam masalah berhak mendapat bantuan hukum. Lembaga hukum memiliki struktur seperti ketua dan anggota yang bertugas atau berkewajiban membantu orang yang membutuhkan bantuan hukum. Salah satu anggota struktur ini adalah advokat, orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan hukum yang memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan pembelaan terhadap masyarakat.

Hal ini tentu menjadi tanda tanya bagi penulis mengapa hal tersebut bisa terjadi, karena jika aspek konsultasi hukum bisa dilakukan secara besar-besaran maka tentu saja pemahaman masyarakat desa terhadap hukum akan semakin meningkat perbuatan melawan hukum tentu bisa diantisipasi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, serta tidak akan ada lagi kejadian kriminalisasi yang dilakukan polisi terhadap masyarakat desa dan sebagian besar penting agar masyarakat tidak lagi merasa acuh dan takut ketika mereka dihadapkan secara langsung dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis berminat untuk meneliti secara lebih komprehensif dengan judul **“Efektivitas Peningkatan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Desa Melalui Lembaga Bantuan**

Hukum Serdang Bedagai Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan hasil penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Efektivitas peningkatan pemahaman hukum kepada masyarakat desa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum.
2. Kendala dalam upaya peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum.
3. Meneliti tingkat implementasi UU No. 16 Tahun 2011 dikalangan masyarakat desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari berkembangnya masalah maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian yaitu:

1. Efektivitas peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
2. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Serdang Bedagai.
3. Implementasi UU No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

1.4 Rumusan Masalah

Dari semua masalah yang telah diuraikan di atas, masalah penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana efektivitas upaya peningkatan pemahaman Hukum di kalangan Masyarakat Desa yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum ?
2. Bagaimana kendala yang dialami Lembaga Bantuan Hukum dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa tersebut?
3. Bagaimana Implementasi dari UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

Kegiatan tanpa adanya tujuan yang jelas akan kurang terarah, sebaliknya pekerjaan atau kegiatan yang jelas tujuannya akan mempermudah pelaksanaan sasaran yang diharapkan. Demikian juga suatu penelitian, dengan berpedoman pada tujuan yang diinginkan. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran faktual mengenai efektivitas upaya pada peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Lembaga Bantuan Hukum dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa.
3. Untuk mengetahui implementasi UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian di atas dapat tercapai maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama :

1.6.1 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis dapat bermanfaat menambah wawasan pengetahuan tentang pemahaman hukum.
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat desa agar paham mengenai hukum.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi yang membutuhkan khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat desa.

1.6.2 Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum yaitu kaitannya dengan peningkatan pemahaman hukum masyarakat desa melalui bantuan LBH.
2. Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai efektivitas peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat desa melalui bantuan LBH.
3. Diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian berikutnya Peningkatan pemahaman hukum masyarakat melalui bantuan LBH.